

# Sri Mulyani Sebut Kemiskinan Terendah,

Ini yang Harus Dikritisi

Reporter: **Dias Prasongko**

Editor: **Rr. Ariyani Yakti Widyastuti**

Kamis, 19 Juli 2018 12:56 WIB



*Warga merapihkan pakaian di pemukiman kumuh Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, 8 Januari 2016. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin periode Maret 2015 sebanyak 28,59 juta jiwa baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jika dibanding periode September 2014, angka penduduk miskin bertambah 27,73 juta orang. TEMPO/Aditia Noviansyah*

TEMPO.CO, Jakarta - Jika sebelumnya Menteri Keuangan [Sri Mulyani](#) Indrawati menyebutkan tingkat kemiskinan per Maret 2018 sebesar 9,82 persen sebagai rekor terendah sepanjang sejarah, tak demikian anggapan dari Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan. Maftuchan mengkritik data tersebut masih melihat kemiskinan dari kaca mata ekonomi saja, yakni dari sisi pengeluaran per kapita.

Baca: [Kemiskinan 9,82 Persen, Sri Mulyani: First Time in History](#)

Oleh karena itu, Maftuchan menilai ukuran kemiskinan oleh BPS yang hanya melihat dari satu dimensi saja tak cenderung tak holistik. "Kita harus membuat ukuran kemiskinan relatif, yakni ukuran yang dinamis dan mengacu pada standar kualitas hidup yang multi-dimensi," katanya seperti dikuti dari keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.

Ads by [Kiosked](#)

Sebelumnya, BPS telah merilis data kemiskinan yang diklaim paling rendah sepanjang sejarah Indonesia yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Jumlah tersebut

berkurang jika dibandingkan pada September 2017 yang mencapai 10,12 persen. Tercatat sebanyak 633,2 ribu orang yang terdiri atas 128,2 ribu orang di perkotaan dan 505 ribu orang di perdesaan berhasil lepas dari label penduduk miskin.

Baca: [Sri Mulyani Sebut Kemiskinan Turun, Ekonom Pertanyakan Hal Ini](#)

Maftuchan mengusulkan seharusnya indikator kemiskinan harus menggunakan kacamata multi-dimensi dalam melihat kemiskinan. Artinya, tingkat kemiskinan tidak hanya didasarkan atas indikator rata-rata pengeluaran per kapita per bulan. Tetapi juga memasukkan indikator lain, seperti dimensi kesehatan, pendidikan, perumahan, akses terhadap air bersih dan energi.

Jika menggunakan indikator yang multi-dimensi, tingkat kemiskinan akan jauh berbeda. Misalnya, kata Maftuchan, hasil penghitungan Indeks Kemiskinan Multidimensi di Indonesia pada tahun 2012-2014 yang dilakukan Perkumpulan Prakarsa menunjukkan bahwa perhitungan kemiskinan dengan pendekatan multi-dimensi bisa lebih besar dibandingkan dengan angka kemiskinan moneter.

"Sebagai contoh pada tahun 2014, Prakarsa menghitung penduduk yang miskin mencapai 29,7 persen, sementara angka kemiskinan moneter tercatat hanya 11,3 persen," kata Maftuchan. Hal ini menunjukkan terdapat gap penduduk miskin yang tidak terlihat oleh pemerintah karena indikator penentuan penduduk miskin yang hanya satu dimensi.

Selain itu, pendekatan multi-dimensi dalam melihat kemiskinan akan membantu pemerintah untuk bisa melihat kemiskinan yang mendekati kenyataan riil di lapangan. Upaya ini, misalnya, membantu penyusunan kebijakan program yang lebih terukur dan sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh penduduk miskin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya turut berbesar hati menanggapi pengumuman Badan Pusat Statistik bahwa per Maret 2018 tingkat [kemiskinan](#) mencapai 9,82 persen. "*The first time in the history of Indonesia*, tingkat kemiskinannya di bawah 10 persen," kata Sri Mulyani di acara peringatan 10 tahun Adaro masuk Bursa Efek Indonesia, Senin, 16 Juli 2018, di Hotel Ritz-Carlton Ballroom, Pacific Place.

Sri Mulyani lalu menjelaskan sejumlah perbandingan tingkat kemiskinan di beberapa masa kepemimpinan presiden sebelumnya. Tingkat kemiskinan pada saat presiden kedua RI, Soeharto, berada di level 11 persen. "Mendekati 10 persen dan itu sudah ada Repelita kelima. Kemudian terjadi krisis dan kemiskinan naik lagi ke level 24 persen," tuturnya.

Sementara di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, [Sri Mulyani](#) yang menjabat sebagai Menteri Keuangan, berupaya menurunkan tingkat kemiskinan. "Pada level hampir mendekati 11 persen juga, tapi setelah itu tetap berhenti pada saat Indonesia belum banyak sekali komoditas," ujarnya.